

Pelatihan Penanganan Kebakaran



KR-Wahyu Imam Ibad

Pelaksanaan pelatihan penanganan kebakaran di Mapolres Sukoharjo.

SUKOHARJO (KR) - Polres Sukoharjo menggelar pelatihan penanganan kebakaran, Senin (3/1) di halaman Mapolres Sukoharjo. Kegiatan ini melibatkan personel Pemadam Kebakaran (Damkar) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo. "Pelatihan dimaksudkan sebagai bentuk antisipasi kejadian kebakaran sekaligus meningkatkan kemampuan personel Polres Sukoharjo dalam penanganan kebakaran," jelas Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan diwakili Kasat Samapta AKP Sri Haryanto.

Petugas Damkar Satpol PP Sukoharjo, Tami mengatakan dalam pelatihan peserta diberi materi kepemadaman, penanganan kebocoran gas elpiji, pengetahuan tentang APAR, serta praktik pemadaman api dengan metode tradisional dan modern. Kepala Satpol PP Sukoharjo, Heru Indarjo, menambahkan sosialisasi dan pelatihan penanganan kebakaran penting dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dasar penanganan kebakaran. Karena itu Damkar Satpol PP Sukoharjo terus melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai berbagai antisipasi kebakaran, bersama berbagai lembaga dan pihak-pihak terkait. (Mam)

Kodim Sukoharjo Vaksin 200 Anak

SUKOHARJO (KR) - Kodim 0726 Sukoharjo melaksanakan vaksinasi Covid-19 dengan sasaran 200 anak usia 6-11 tahun. Kegiatan digelar di Makodim 0726 Sukoharjo, belum lama ini, menggunakan vaksin Sinovac sesuai rekomendasi pemerintah pusat. Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Inf Agus Adhy Darmawan melalui Pasiterdim 0726 Sukoharjo Kapten Czi Hartono mengatakan, sebelumnya Kodim 0726 Sukoharjo juga melaksanakan vaksinasi serupa.

"Vaksinasi untuk anak-anak usia 6-11 tahun ini sebagai upaya mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran sekaligus membasmi virus korona, terutama untuk mencegah ancaman varian baru. Dalam kegiatan ini kami meengerahkan tenaga medis atau vaksinator dari anggota Klinik Pratama Kartika 26 Kodim Sukoharjo. Sasarannya antara lain anak-anak KBT Kodim Sukoharjo dan anak-anak warga sekitar Makodim 0726 Sukoharjo. Dengan demikian bisa terbentuk kekebalan masyarakat," jelas Kapten Hartono. (Mam)

ANTISIPASI PENYEBARAN OMICRON

Pengetatan Pengawasan Pendetang Dilakukan Hingga Tingkat RT/RW

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo meminta kepada camat, kepala desa, lurah hingga pengurus RT/RW membantu pengawasan wilayah sebagai antisipasi penyebaran virus Corona varian Omicron. Pengetatan dilakukan khususnya menasar pada orang yang baru pulang dari luar negeri dan mobilitas pendatang luar daerah. Masyarakat juga tetap diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kamis (6/1) mengatakan, Pemkab Sukoharjo terus melakukan pengetatan pengawasan terhadap mobilitas masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan antisipasi penyebaran virus Corona termasuk varian baru Omicron. Pencegahan dilakukan dengan melibatkan camat, kepala desa, lurah hingga pengurus RT/RW.

Pemkab Sukoharjo juga sudah

memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk bergerak cepat melakukan pencegahan masuknya virus Corona varian Omicron. OPD yang terlibat seperti Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), RSUD Ir Soekarno Sukoharjo dan lainnya.

"Jajaran OPD, camat, kepala desa, lurah hingga pengurus RT/RW sudah kami minta memperketat pengawasan sebagai antisipasi penyebaran virus Corona varian baru Omicron. Tidak kalah penting masyarakat juga harus tetap patuh memperketat protokol kesehatan," ujarnya.

Bupati mengatakan, berdasarkan laporan dari dinas terkait di Kabupaten Sukoharjo belum ada temuan kasus warga terkonfirmasi positif virus Corona varian baru Omicron. "Belum ada, janganlah mudah-mudahan tidak ada temuan Omicron. Pemkab Sukoharjo sudah

meminta semua pihak memperketat pengawasan. Pemkab juga sudah berusaha keras menekan kasus dan jumlahnya terus menurun," lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo meminta pengetatan pengawasan dilakukan terhadap orang yang baru pulang dari luar negeri. "Apabila ada informasi orang pulang dari luar negeri maka pengurus RT/RW bisa meneruskan informasi itu ke kepala desa atau lurah dan camat. Nanti akan ditindaklanjuti," lanjutnya.

Wakil Bupati Sukoharjo Agus Santosa menambahkan, pergerakan orang dari luar daerah baik hanya sekedar melintas maupun beraktivitas serta tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo sangat tinggi. Hal ini mengingat Kabupaten Sukoharjo berada di daerah tengah di Solo Raya dimana menjadi daya tarik sendiri bagi dunia usaha. Banyak pelaku usaha dan industri

berdiri dan memerlukan banyak pekerja. Di sisi lain secara geografis posisi ditengah membuat mobilitas pendatang yang melintas di wilayah Kabupaten Sukoharjo tinggi.

Melihat hal ini, Agus Santosa melihat wajar perlu dilakukan pengetatan pengawasan sebagai antisipasi penyebaran virus Corona termasuk varian baru Omicron di Sukoharjo. Pemeriksaan dan pengecekan kondisi kesehatan pendatang juga perlu dilakukan untuk memastikan pendatang tersebut sehat atau tidak.

Agus Santosa menambahkan, sesuai kebijakan dari pemerintah pusat terkait isolasi mandiri dan antisipasi masuknya Omicron maka semua daerah wajib melakukannya. Pemkab Sukoharjo sudah melaksanakan semua prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat. (Mam) -d

Poliklinik Eksekutif dan UNS Aesthetic Center Diresmikan

SOLO (KR) - Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo memilih gagal jantung sebagai unggulan tahap pertama. Layanan jantung ini dikembangkan karena masyarakat sangat membutuhkan. Sementara di Indonesia center gagal jantung baru ada 11 dan pasiennya sangat banyak.

"Kalau keunggulan gagal jantung sudah paripurna, berikutnya akan mengembangkan keunggulan yang lainnya," jelas Prof Dr Hartono, Direktur RS UNS usai Peresmian Poliklinik Eksekutif dan UNS Aesthetic Center di Pabelan, Kamis (6/1).

Selama ini potensi keunggulan yang lain sudah difasilitasi baik dalam hal pengembangan sumber daya manusia maupun peralatan. Dengan harapan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk

pembukaan Poliklinik Eksekutif. Peresmian Poliklinik Eksekutif dan UNS Aesthetic Center dilakukan Rektor UNS Prof Dr Jamal Wiwoho. Ia menilai kehadiran layanan baru ini merupakan kemajuan dalam mengembangkan layanan kepada masyarakat.

Pada tahun kelima RS UNS terus melakukan inovasi dan perbaikan perbaikan. Pembukaan Poliklinik Eksekutif. Peresmian dan UNS Aesthetic Center bagian dari grand

desain.

Ke depan RS UNS secara bertahap ditargetkan menjadi tipe A, Rumah Sakit Pendidikan Utama yang bereputasi internasional. Ia optimis karena kinerjanya setiap tahun menunjukkan peningkatan. Diantaranya terlihat bertambahnya layanan spesialis.

Menjawab pertanyaan apakah dalam 5 tahun ini sudah mencapai Break Event Point (BEP), Prof Jamal menyatakan pengelolaan rumah sakit lebih

mengutamakan pelayanan, disamping memberikan pemahaman mahasiswa dan dosen Fakultas Kedokteran, bahwa mereka bisa mengabdikan dirinya.

"Jadi surplus bukan tu-

juan utama dan bukan berorientasi keunrunan. Yang pasti mulai 2020 UNS sudah tidak memberi subsidi pada Rumah Sakit. Dan 2021 RS memberi kontribusi pada UNS," jelas Prof Jamal. (Qom)



KR-Qomarul Hadi

Prof Jamal meninjau layanan baru Poliklinik Eksekutif.

HUKUM

Bakar Obat Nyamuk, Rumah Ludes



KR-Abdul Alim

Pemadaman kebakaran di rumah korban.

KARANGANYAR (KR) - Kebakaran di rumah Sugiman (69) warga Dukuh Jati Rt 01/Rw X Desa Malanggaten Kebakkramat, menyebabkan kerugian sampai ratusan juta rupiah. Kebakaran itu dipicu obat nyamuk yang membakar kasur.

Bangunan permanen milik korban yang luluh lantak, hanya menyisakan puing-puing. Si jago merah mulai membara pada Kamis (6/1) pukul 06.50.

Hal itu baru disadari korban saat terbangun akibat menghirup asap dan panas dari nyala api. Ia melihat api menjilat-jilat atap.

"Saat itulah korban terbangun dan melihat dirinya dikepung api. Korban berusaha berlari keluar rumah dan tidak sempat menyelamatkan banyak barang," jelas Kasi Humas Polres Karanganyar, AKP Agung Purwoko kepada wartawan.

Korban berlari menjauh dari rumahnya sambil berteriak histeris. Suara

jeritannya didengar sejumlah tetangga yang kemudian membantu memadamkan api secara sederhana. Sayangnya cara itu gagal menaklukkan si jago merah yang kian membesar.

Akhirnya, warga memutuskan menghubungi tim pemadam kebakaran. Sekitar 30 menit kemudian dua unit mobil PMK merapat. Api pun dapat dipadamkan meski terlanjur melumat harta benda korban.

Agung mengatakan nilai kerugian materi mencapai Rp 206 juta. Di antaranya rumah ludes tinggal menyisakan puing, tiga unit sepeda motor, tiga sertipikat aset properti, kulkas, laptop, TV sampai dagangan kelontong.

Agung mengatakan berdasarkan penyelidikan polisi, kebakaran dipicu korban lupa mematikan obat nyamuk bakar. Baranya mengenai kasur busa yang kemudian menyulut api. "Beruntung tidak ada korban jiwa. Saat ini korban mengungsi dulu di rumah tetangga," ujarnya. (Lim)

PERKARA KORUPSI GANTI RUGI JJLS

Polisi Limpahkan Berkas ke Kejari Wonosari

WONOSARI (KR) - Berkas perkara dugaan korupsi uang ganti pembebasan lahan proyek Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) senilai Rp 5,2 miliar dengan tersangka oknum mantan lurah desa Karangawen Girisubo, Roj (50), dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosari Rabu (5/1).

Kasat Reskrim Polres Gunungkidul AKP Riyan Permana Putra mengatakan berkas perkara diserahkan setelah sebelumnya sempat dikembalikan oleh Kejari karena masih diperlukan perbaikan. "Sudah kami lengkapi semua, termasuk memperbaiki berkas sesuai petunjuk Kejari," jelasnya Rabu (5/1) kemarin.

Kasus korupsi ini melibatkan oknum mantan Lurah Karangawen Girisubo, Roj, sebagai tersangka yang diduga telah menggelapkan uang se-

nilai Rp 5,2 miliar dari total uang ganti pembebasan lahan milik kalurahan sekitar Rp 7 miliar. Sejuah ini, sudah ada 39 saksi yang dimintai keterangan terkait perkara tersebut. Mengenai tambahan tersangka, Riyan mengatakan masih diperlukan kajian lebih mendalam bersama Kejari Gunungkidul.

"Ada tambahan barang bukti berupa sebidang tanah serta bangunan limasan hasil dari korupsi tersebut. Nilai total dari kedua aset

itu mencapai sekitar Rp 300 juta," imbuhnya.

Adapun mengenai uangnya hasil korupsi sebagian besar sudah digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi seperti membayar utang, judi dan foya-foya. Sebelumnya, tersangka Roj diproses hukum lantaran diduga menggelapkan uang ganti pembebasan lahan proyek JJLS tersebut dengan cara mentransfer ke rekening pribadi.

Roj diketahui hanya mentransfer uang tersebut senilai Rp 1,8 miliar ke rekening kalurahan. Atas perbuatannya, tersangka dikenai Pasal 2, subsider Pasal 3, lebih subsider Pasal 8 UU RI 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU RI 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. (Bmp)

KETUA PMI DIY DIGUGAT PERDATA

Penggugat Belum Sah Jadi Pengurus PMI Kota

SLEMAN (KR) - Gugatan Perdata pada Ketua PMI DIY tidak mengikutsertakan Ketua PMI Kota Yogya Heroe Poerwadi sebagai Penggugat. Justru Penggugat Pengurus hasil Musyawarah Kota (Muskot) 30 Maret 2021 belum bisa disebut pengurus karena hingga saat ini belum mendapat pengesahan dari Ketua PMI DIY.

"Penggugat belum memenuhi/melanggar AD/ART PMI. Bahkan tidak disertai kelengkapan audit eksternal dari PMI Kota Yogya, serta tidak terpenuhinya format untuk kepengurusan sesuai AD/ART," ucap saksi Kepala Bidang Hukum dan Advokasi PMI DIY, Kardi SH, dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum pada tergugat Ketua PMI DIY di PN Sleman, Rabu (5/1).

Saksi yang dihadirkan kuasa hukum tergugat On-

can Poerba SH, Willyam Saragih SH dan FX Yoga Nugrahanto SH, menegaskan menjadi pengurus PMI adalah untuk sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. "Permasalahan internal organisasi PMI, tidak seharusnya diajukan ke pengadilan, mestinya diajukan ke Mahkamah Organisasi PMI," jelasnya.

Di depan majelis hakim yang diketua Joko Saptono SH, Kardi menyebutkan arahan yang sudah disepakati PMI Pusat, PMI Propinsi DIY dan Ketua Terpilih PMI Kota Yogya Heru Purwadi belum dilaksanakan.

"Sejak kesepakatan 18 Juni 2021 sampai saat ini, Ketua Terpilih Heroe Poerwadi belum melaksanakan kesepakatan tersebut sehingga Ketua PMI DIY tidak bisa melakukan penge-

sahan," tegasnya. Sementara saksi lain-

nya, Kepala Markas PMI DIY Muhammad Zaki Ali, menyatakan PMI DIY sudah mengirim surat kepada Ketua Terpilih PMI Kota Yogya Heroe Poerwadi, untuk segera menindaklanjuti kesepakatan dan arahan dari PMI Pusat dan PMI DIY.

"Suratnya sudah dikirim kepada Pak Heroe Poerwadi sebagai Ketua Terpilih PMI Kota Yogya dan sudah diterima, namun arahan dan kesepakatan bersama itu belum dilaksanakan hingga saat ini," ujarnya.

Sementara Oncan Poerba menegaskan tanpa mengikutsertakan Heroe Purwadi sebagai Ketua Terpilih, para penggugat bukanlah sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dan tidak memiliki legal standing dalam perkara tersebut. (Vin)



KR-Juvintarto

Suasana pemeriksaan saksi dengan bukti dokumen yang ada di PN Sleman.